

**RELEVANSI PERATURAN DAERAH DALAM
PEROMBAKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DKI
JAKARTA**

Bima Saputra

ABSTRAK

DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara telah menjadi pusat peradaban kehidupan di Indonesia. Maka dari itu, seyogyanya Jakarta memerlukan sistematisasi pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Pemerintahan dalam skala daerah dikelola melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana perombakan terhadap SKPD memang telah mencuat sejak 2019 silam, dimana sudah sekitar 2 tahun Bapak Anies Rasyid Baswedan sejak dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itulah Gubernur DKI Jakarta menyampaikan rencana perombakan SKPD dalam rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta, Gubernur menyampaikan akan melakukan perombakan terhadap 42 SKPD yang ada, rinciannya ialah 1 perangkat akan dipecah menjadi 2, kemudian 1 perangkat akan dibubarkan, dan terdapat 5 perangkat yang akan mengalami perubahan nomenklatur. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perlu dikaji secara mendalam apakah perombakan terhadap SKPD yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan maksimal atau tidak, sehingga berpengaruh terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta itu sendiri. Lalu, bagaimana kiranya mekanisme perombakan SKPD yang seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi peraturan daerah dalam perombakan satuan kerja perangkat daerah terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta sangat penting. Dengan adanya peraturan daerah yang jelas dan tegas, perombakan satuan kerja perangkat daerah dapat dilakukan dengan lebih

efektif dan efisien. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah urgensi peraturan daerah dalam perombakan satuan kerja perangkat daerah terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta sangat penting.

Kata kunci: Satuan Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

THE RELEVANCE OF LOCAL REGULATIONS IN THE RESHUFFLE OF REGIONAL WORK UNITS ON THE PERFORMANCE OF THE JAKARTA PROVINCIAL GOVERNMENT

Bima Saputra

ABSTRACT

DKI Jakarta as the capital city has become the center of civilization in Indonesia. Therefore, Jakarta should require a well-organized systematic government. Government on a regional scale is managed through Regional Work Units. The plan to reshuffle the SKPD has indeed surfaced since 2019, where it has been about 2 years since Mr. Anies Rasyid Baswedan was inaugurated as Governor of DKI Jakarta. At that time the Governor of DKI Jakarta conveyed the plan to reshuffle the SKPD in a plenary meeting with the DKI Jakarta DPRD, the Governor said that he would reshuffle the existing 42 SKPD, the details of which were that 1 device would be split into 2, then 1 device would be dissolved, and there were 5 devices that would undergo nomenclature changes. However, in its implementation, it needs to be studied in depth whether the reshuffle of SKPD carried out by the DKI Jakarta Provincial Government has run optimally or not, so that it affects the performance of the DKI Jakarta Provincial Government itself. Then, how should the SKPD reshuffle mechanism be in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia. This research uses a qualitative method with an analytical descriptive approach. The results showed that the urgency of local regulations in the reshuffle of regional work units on the performance of the DKI Jakarta Provincial Government is very important. With the existence of clear and firm regional regulations, the reshuffle of the work unit role is very important

Keywords: *Regional Apparatus Work Unit, Local Regulation, Government of the Province*